



2016

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

B2

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 4 Nopember 2016 No. 88

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.
2. Jabatan : CALON GUBERNUR - DKI JAKARTA PERIODE 2017 - 2022
3. NHK : 180169
4. Tempat & Tanggal Lahir : KUNINGAN, 7 Mei 1969
5. Alamat Kantor : Jl. ____, ---
6. Tanggal Pelaporan : 28 Nopember 2014, 20 September 2016

Status Laporan

		Status Laporan	
		28 Nopember 2014	20 September 2016
Rp.	7.381.483.000	Rp.	9.901.255.000
Rp.	7.192.100.000	Rp.	8.408.525.000

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 1.655 m² & 565 m², di Kota JAKARTA SELATAN, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2010 sampai dengan 2016 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)

180169

Status Laporan

	28 Nopember 2014	20 September 2016
2. Tanah seluas 91 m2 , di Kota JAKARTA SELATAN, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2012 sampai dengan 2013 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 189.383.000	Rp. 1.492.730.000
B. HARTA BERGERAK		
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	Rp. 239.580.494	Rp. 352.000.000
1. Mobil, merk TOYOTA AVANZA, tahun pembuatan 2012, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 88.975.575	Rp. 112.000.000
2. Mobil, merk TOYOTA KIJANG INNOVA, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 150.604.919	Rp. 105.000.000
3. Mobil, merk MAZDA 2, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2016 (Penambahan Data Baru)	----	Rp. 135.000.000
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	-----	-----
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 362.910.910	Rp. 671.463.848
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari WARISAN, perolehan dari tahun 1985 sampai dengan 2016 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 154.500.000	Rp. 333.133.348

180169

		Status Laporan	
		28 Nopember 2014	20 September 2016
2.	BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2005 sampai dengan 2016 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 208.410.910	Rp. 338.330.500
C.	SURAT BERHARGA	Rp. 112.317.000	Rp. 88.768.976
1.	Tahun investasi dari 2012 sampai dengan 2013 yang berasal dari HASIL SENDIRI	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
2.	Tahun investasi 2008, yang berasal dari WARISAN (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 62.317.000	Rp. 38.768.976
D.	GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 519.908.238	Rp. 701.714.556
		USD 9.871	USD 8.893
1.	Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Penghapusan Data Karena Dikonsumsi, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 519.908.238	Rp. 701.714.556
		USD 9.871	USD 8.893
E.	PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)		Rp. 8.616.199.642	Rp. 11.715.202.380
		USD 9.871	USD 8.893
III.	HUTANG	Rp. 4.678.495.158	Rp. 4.408.159.775
1.	Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 4.678.495.158	Rp. 4.408.159.775

180169

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)

Status Laporan

28 Nopember 2014		20 September 2016	
Rp.	3.937.704.484	Rp.	7.307.042.605
USD	9.871	USD	8.893

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

Berita Negara Republik Indonesia
Tanggal 4 Nopember 2016 No.88

